

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Kerja Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nua sehingga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini memuat Rencana Kerja Tahun 2022, capaian kinerja tahun lalu, pendanaan tahun 2020.

Kami sangat menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan dan penyempurnaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan Tahun 2022, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Painan, Maret 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 196505311998031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	52
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.....	53
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	104
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan	54
3.3 Program dan Kegiatan.....	111
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN.	122
BAB V PENUTUP	123

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai penjabaran dari Renstra, setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dokumen ini dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun lalu.

Dalam penyusunan Renja SKPD dimulai dengan mengumpulkan pengolahandata dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan review hasil evaluasi tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS);
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
- 1.2.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se- Kabupaten Pesisir Selatan;

1.2.8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan kesehatan selama satu tahun yang meliputi Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah memberikan arah sekaligus pedoman dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam renstra secara berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan kerja yang memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang ingin dicapai selama satu tahun berjalan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini disusun dengan memperhatikan target pencapaian indikator kinerja dan diharapkan sudah mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Kesehatan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, Serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan proses tersebut dilakukan, serta temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari tabel program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang diuraikan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah presentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap program dan kegiatan, antara lain:

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.301098.061	90,58	86,82
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 121.020.000	100	73,86
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp.123.137.590	100	85,29
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 100.690.620	100	94,12
Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Rp.131.500.000	100	99,99
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 10.670.000	100	96,17
Penyediaan alat tulis kantor	Rp.22.440.750	100	99,99
Pemyediaan barang cetakkan dan penggandaan	Rp.13.041.416	100	99,84
Penyediaan makanan dan minuman	Rp.19.490.000	100	99,89

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.40.491.487	100	90
Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp. 36.100.000	100	86,16
Penunjang Operasional perencanaan dan pelaporan	Rp. 68.856.884	100	88,6
Penunjang operasional administrasi perkantoran puskesmas	Rp.1.605.910.00 4	100	96,24

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 76.100.000	100	100
Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor	Rp. 76.100.000	100	100

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.8.767.050	100	100
Legalisasi dan registrasi tenaga fungsional Kesehatan	Rp.8.767.050	100	100

D. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Fisik	Keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.5.032.178.170	99,97	86,75
Pengadaan obat & perbekalan Kesehatan (DAK)	Rp.2.625.938.000	100	95,36
Pengadaan obat & perbekalan Kesehatan (DAK Penugasan)	Rp. 2.153.532.008	100	91,34
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Kesehatan (pajak rokok)	Rp. 234.918.162	99,67	93,14

Pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan (penunjang DAK) (Pajak rokok)	Rp. 17.790.000	97,11	91,18
---	----------------	-------	-------

E. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program	Anggaran	Realisasi	
		Fisik	Keuangan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.24.547.859.012	95,25	83,05
Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan	Rp. 42.817.942	99,33	83,01
Peningkatan Kesehatan masyarakat	Rp. 2.083.564.432	93,92	88,79
Pembinaan upaya Kesehatan dasar masyarakat (BOK) (DAK NF)	Rp. 22.421.476.638	92,50	82,51

F. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.216.221.500.	21,44	14,77
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Rp.1.054.500	100	100
Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya (DAK NF)	Rp. 215.167.000	21,05	14,35

G. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.84.825.000	100	100

Pengembangan media promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Rp.60.770.000	100	100
Pembinaan peran serta masyarakat	Rp. 24.055.000	100	100

H. Program Perbaikan gizi Masyarakat

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Perbaikan gizi Masyarakat	Rp.58.737.980	95,74	93,14
Peningkatan gizi masyarakat	Rp. 313.792.980	95,74	93,14

I. Program pengembangan lingkungan sehat

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program pengembangan lingkungan sehat	Rp.395.623.453	99,92	99,15
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Rp.313.792.950	100	99,98
Penunjang program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)	Rp.5.049.450	100	100
Pengelolaan daya dan pengembangan pemeriksaan sanitasi dasar masyarakat	Rp. 22.713.125	00	00
Pelaksanaan forum kecamatan dan kabupaten sehat	Rp. 53.707.928	100	94,88

J. Program pencegahan penanggulangan penyakit menular

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program pencegahan penanggulangan penyakit menular	Rp.6.340.180.587	99,52	66,37
Pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit menular serta penyakit endemic	Rp.363.237.687	100	68,1
Peningkatan Imunisasi	Rp. 76.677.409	100	98,61
Peningkatan Surveillance dan Epidemiologi dan Penanggulangan wabah	Rp.153.314.621	100	70,40
Pengelolaan pelayanan kes. Bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana covid-19	Rp. 4.479.900.870	99,80	66,34
Upaya pengurangan resiko Krisi Kesehatan dan pasca Krisi Kesehatan	Rp. 1.267.050.000	98,33	63,93

K. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.1.613.575.196	46,97	26,33
Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan	Rp. 101.510.786	100	91,34
Akreditasi, sertifikasi dan registrasi kes.	Rp. 1.479.080.000	43,27	20,80
Pengelolaan dan pembinaan pegawai	Rp. 15.850.000	100	88,64
Upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kes	Rp. 17.134.410	91,65	61,42

**L. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
Puskesmas/Pustu dan jaringannya**

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Rp.28.646.528.245	96,93	92,88
Pengadaan perangkat system informasi Kesehatan kab. (DAK regular)	Rp. 506.000.000	100	81,44
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (Dak & pendamping)	Rp. 13.081.745.000	94,1	92,06
Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas (DAK Penugasan)	Rp. 1.468.150.499	100	84,57
Pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	Rp.3.655.079.489	99,91	96,47
Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas	Rp. 9.240.100.000	100	94,52
Pengadaan alat dan bahan pengendalian peny. dan kesling	Rp. 217.493.200	100	97,59
Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas (Pajak rokok)	Rp. 150.000.000	99,08	77,43

M. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Rp.1.591.296.087	99,98	96,99
Pengadaan alkes RS (DAK)	Rp. 1.065.996.087	100	96,99
Pengadaan alkes covid-19	Rp. 525.300.000	99,95	96,01

N. Program Kemitaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Kemitaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp.10.314.940.628	99.11	92.53
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Rp.9.519.158.778	100	95,84
Kemitraan asuransi Kesehatan masyarakat (CHT)	Rp.78.870.000	5	00
Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) (JKN)	Rp. 24.911.850	92.85	47,60
Pelayanan Kesehatan (non kapitasi) (JKN)	Rp. 475.000.000	100	64,44

O. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Pelayanan pemeliharaan Kesehatan	Rp. 7.593.000	98,22	85,24

Pelayanan pemeliharaan Kesehatan	Rp. 7.593.000	66,61	35,92
----------------------------------	---------------	-------	-------

P. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan & anak	Rp. 1.092.371.250	98,22	85,24
Usaha Kesehatan ibu dan anak	Rp. 17.220.500	99,07	96,27
Pelayanan Kesehatan Apras	Rp.1.817.750	100	100
Usaha Kesehatan ibu & anak (jampersal)	Rp.1.073.333.000	98,20	85,04

Q. Program pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular	Rp.122.525.730	100	83,57
Pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular	Rp.85.706.277	100	77,70
Pemantauan dan penanggulangan masalah Kesehatan matra	Rp. 4.128.550	100	100
Pelayanan Kesehatan ODGJ berat	Rp.32.690.903	100	96,87

R. Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan RS

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS	Rp. 5.015.001.000	99,76	96,70
Operasional pelayanan RSU Pratama Tapan	Rp. 5.015.001.000	99,76	96,70

S. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 26.498.777.612	94.08	86.12
Penyediaan kebutuhan Pelayanan BLUD	Rp. 26.498.777.612	94.08	86.12

T. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.48.853.000	100	95,67
Peningkatan manajemen asset/Barang daerah	Rp.48.853.000	100	95,67

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2020 berupa capaian keuangan sudah mencapai 86.82%. Berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat dinilai dengan penilaian berikut ini :

1. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 76% – 100% dan dikategorikan berhasil / tercapai. Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-baiknya
2. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai <75% dan dikategorikan belum tercapai

Hambatan & Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan:**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dalam Pencapaian target kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 98,09% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 94,18%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Pencapaian target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik secara anggaran dapat dilaksanakan 100% dan pencapaian target keuangan 73,86%, Dalam pelaksanaan kegiatan masih ada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

yang belum terbayarkan karena anggaran tidak mencukupi untuk pembayaran air dan listrik tahun anggaran 2020

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
Pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinaan Kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan 100% dan target kinerja keuangan 85,29 %. Pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan tahun 2020
3. Penyediaan Administrasi Keuangan
Pencapaian target kinerja kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan dapat dilaksanakan 94,12% dan pencapaian target kinerja keuangan 100 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pencapaian target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dapat dilaksanakan 100% dan target kinerja keuangan 99,99 % hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pencapaian target kinerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dapat dilaksanakan 100% dan target kinerja keuangan 96,17 % hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pencapaian target kinerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor dapat dilaksanakan 100% dan target kinerja keuangan 99,99% hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2019.
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dapat dilaksanakan 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 99,84 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 99,84%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 98,21%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pencapaian target kinerja Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 99,89 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pencapaian target kinerja Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 90,00 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Pencapaian target kinerja Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 86,16 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

13. Penunjang Operasional perencanaan dan Pelaporan

Pencapaian target kinerja Kegiatan Penunjang Operasional perencanaan dan Pelaporan 90 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 88,06%, hal ini Tidak selesainya Pembuatan Profil Kesehatan tahun 2020 karena terkendala data.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dapat dilaksanakan 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 98,12% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 98,12%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dilaksanakan 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 100 %. dengan rincian sebagai berikut:

1. Legalisasi dan Registrasi Tenaga Fungsional Kesehatan

Pencapaian target kinerja Kegiatan Legalisasi dan Registrasi Tenaga Fungsional Kesehatan 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 100 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dalam Pencapaian target kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dapat dilaksanakan 99,97 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 93,525%, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU	CAPAI AN	KENDALA DAN HAMBATAN
1	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Rp. 234.918.162,-	93.13 %	Terdapat satu kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena masuk dalam anggaran perubahan yang baru disahkan di akhir bulan Nopember 2020 yaitu perjalanan penjemputan logistic obat, vaksin dan bahan habis pakai ke Dinas Kesehatan propinsi Sumatera Barat.
2	Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya	Rp. 1.045.000,-	100 %	Terjadi refocusing anggaran akibat pandemi COVID 19
3	Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya (DAK Non Fisik)	Rp. 215.167.000,-	14,35 %	Sebagian besar kegiatan pada anggaran ini tidak dapat dilaksanakan karena format kegiatan berupa acara yang mengundang orang dalam jumlah yang banyak sedangkan kondisi tahun 2020 sedang terjadi peningkatan kasus COVID 19
4	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Rp. 2.625.938.000,-	96,43 %	Tidak ada kendala. Sisa anggaran terjadi akibat ada 1 paket pengadaan obat yang tidak terpenuhi dan sisa anggaran dari sisa kontrak setelah negosiasi
5	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Penugasan)	Rp. 2.153.532.008,-	90 %	Tidak ada kendala. Sisa anggaran terjadi akibat adanya perubahan kuantiti dari perencanaan awal sebab stok sebelumnya masih banyak dan mecukupi

6	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Penunjang DAK)	Rp. 17.790.000,-	91.1 %	Tidak ada kendala. Pekerjaan sudah terlaksana 100 % dan bisa efisiensi anggaran.
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Covid 19	Rp. 4.479.900.870,-	66,33 %	Terdapat beberapa item belanja yang tidak jadi direalisasikan pertama karena dasar stok ketersediaan yang ada dan yang kedua karena ketersediaan barang di pasaran.
8	Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK)	Rp. 217.493.200,-	97.60 %	Tidak ada kendala. Pekerjaan sudah terlaksana 100 % dan bisa efisiensi anggaran.

e. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat. Adapun sasaran atau capaian hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan yaitu:

- 1) Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di rumah tangga, kelompok risiko tinggi (risti) melalui upaya perawatan kesehatan masyarakat dan PISPK.
- 2) Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat pada wilayah atau daerah terpencil.
- 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat.
- 4) Terlaksananya intervensi lanjutan masalah individu dan keluarga pada PISPK.

Secara fisik kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 99,50 % dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 35.543.874,- dari alokasi anggaran Rp. 42.817.942 atau sebesar 83,01 %. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- 1) Terlaksananya kunjungan petugas Puskesmas dan kader pada individu dan rumah tangga dalam rangka perawatan kesehatan masyarakat keluarga risti dan intervensi masalah kesehatan keluarga (PISPK) terhadap 2.176 KK atau 23,45 % dari target 30 % selama Tahun 2020.
- 2) Terlaksananya pelayanan kesehatan pada daerah terpencil di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6 (enam) lokasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan memberikan asupan nutrisi susu pada Balita, Ibu Hamil dan Lansia sebanyak 600 kotak pada daerah terpencil Ngalau Gadang dan Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Taratak tampatih

Kecamatan Batang Kapas, Langgai dan Batu Bala Kecamatan Sutera, Pasir Ganting Kecamatan Airpura dan daerah Incasi Raya Kecamatan Pancung Soal.

- 3) Pengadaan bahan kontak pelayanan kesehatan daerah terpencil, yaitu 200 kotak susu Balita, 200 kotak susu Ibu Hamil dan 200 kotak susu Lansia.
- 4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan petugas dan Puskesmas dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pada 20 Puskesmas.

Kendala dan permasalahan:

- Terjadinya Pandemi COVID-19, sehingga kegiatan tidak optimal selama bulan Maret s/d Juni 2020.
- Petugas Puskesmas lebih banyak melaksanakan kegiatan surveillance dan tracking COVID-19

Solusi dan Upaya Pemecahan Masalah

- Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan pada bulan Agustus sampai dengan November 2020, terkait dengan perawatan kesehatan masyarakat dan intervensi lanjutan PISPK.
- Melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Puskesmas, Pustu dan Poskesri dan Pos Kesehatan. Adapun sasaran atau capaian hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan yaitu:

- 1) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas pada unit rawat jalan (poliklinik), rawat inap, UGD dan laboratorium pada 20 Puskesmas.
- 2) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan Pos Kesehatan terpadu di 15 wilayah Kecamatan termasuk objek-objek wisata.

Realisasi fisik kegiatan ini yaitu 87,27 % dengan 96,50 dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 113.343,245,- dari pagu anggaran Rp. 140.279.682,- atau 80,80 %. Tidak terealisasinya keuangan kegiatan 100 % disebabkan karena pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Pos Kesehatan Hari Raya Idul Fithri pada 12 Pos Kesehatan tidak terlaksanan karena Pandemi COVID-19.

Kendala dan permasalahan:

- Terjadinya Pandemi COVID-19, sehingga kegiatan tidak optimal selama bulan Maret s/d Juni 2020.
- Petugas Puskesmas lebih banyak dan fokus melaksanakan kegiatan surveillance dan tracking COVID-19 termasuk pemeriksaan Rapid Test dan PCR.

Solusi dan Upaya Pemecahan Masalah

- Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan pada bulan Agustus sampai dengan November 2020, terkait dengan perawatan kesehatan masyarakat dan intervensi lanjutan PISPK.
 - Melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Dalam Pencapaian target kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 100 %, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Pajak Rokok)
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Pajak Rokok) 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 100 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
 2. Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PSM) (Pajak Rokok)
Pencapaian target kinerja Kegiatan Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PSM) (Pajak Rokok) 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
- g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Dalam Pencapaian target kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat dapat dilaksanakan 95,74 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 93,14 %, dengan rincian sebagai berikut :
1. Peningkatan Gizi Masyarakat
Pencapaian target kinerja Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat (Pajak Rokok) 95,74 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 93,14 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
- h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Dalam Pencapaian target kinerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat dapat dilaksanakan 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 99,15%, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 99,98%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan

sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

2. Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) (Pajak Rokok) 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2019.

3. Pengelolaan Dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat (Pajak Rokok) 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 97,499%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

4. Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat (Pajak Rokok) 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 94,88 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

i. Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

Dalam Pencapaian target kinerja Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular dapat dilaksanakan 99,52 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 66,37%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Serta Penyakit Endemik / Epidemik (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Serta Penyakit Endemik / Epidemik (Pajak Rokok) 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 66,81 %, hal ini disebabkan :

- Fogging akan dapat dilaksanakan .apabila ada kasus DBD
- Transmission Assesment Survey (TAS) yang akan dilaksanakan bersama Tim dari Kemenkes bulan Oktober/November ditunda karena pandemi Covid-19
- Perjalanan dinas dalam daerah yang tersisa tidak dilaksanakan karena tidak terjadi KLB.

2. Peningkatan Imunisasi (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Penyemprotan Peningkatan Imunisasi (Pajak Rokok) 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 98,61%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya terkendala pandemi covid-19

3. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (Pajak Rokok)
Kegiatan sudah dilaksanakan 86%, realisasi keuangan 70,40%. Dana yang tidak bisa dicairkan 100% adalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Workshop Sistem Kewaspadaan Dini & Respon KLB, yang terdiri dari uang saku & transport petugas surveilans puskesmas, biaya akomodasi (Biaya penginapan di hotel), sewa ruang pertemuan, Belanja makan minum untuk pertemuan dan Honorarium tenaga ahli / Narasumber.

Hal ini terutama disebabkan karena adanya kejadian Pandemi / Wabah Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana untuk kegiatan Workshop atau Pertemuan tatap muka di hotel tidak bisa dilaksanakan selama adanya Pandemi/Wabah Covid-19.

4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana COVID-19

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana COVID-19

99,80 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 66,34%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya terkendala pandemi covid-19

5. Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Penanggulangan Covid-19)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Penanggulangan Covid-19) 63,93 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 66,34%, hal ini disebabkan :

- Dana yang belum terealisasi berupa insentif jasa petugas swab puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan karena pencairannya dihitung sesuai jumlah pelaksanaan swab.
- Perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan digunakan sesuai untuk pengantaran hasil swab ke padang.
- Belanja pembelian peralatan kebersihan untuk Rusunawa tidak terealisasi karena Rusunawa sudah dialihkan ke RSUD M.Zen sebagai penanggungjawab

j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dalam Pencapaian target kinerja Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan 46,97 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 26,336%, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU	CAPAIAN	KENDALA DAN HAMBATAN
1	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAU)	Rp. 101.510.786	91.34 %	Terdapat satu kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena masuk dalam anggaran perubahan yang baru disahkan di akhir bulan Nopember

				2020 yaitu perjalanan Dinas dan BBM .
2	Akredistrasi, Registrasi, dan Sertifikasi (DAK NF)	Rp. 1.479.080.000	20.80 %	1. Pendampingan Pasca Akreditasi hanya terlaksana 5 Puskesmas dan 15 Puskesmas tidak terlaksana karena akibat pandemi COVID 19 2. Survei Akreditasi untuk 9 Puskesmas juga tidak terlaksana karena akibat COVID -19 3. Workshop pendukung Akreditasi terlaksana 4 Angkatan, dan 2 angkatan tidak terlaksana karena keterbatasan waktu realisasi anggaran sudah berakhir di akhir bulan November 2020

k. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Dalam Pencapaian target kinerja Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dapat dilaksanakan 96,93 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 92,98%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten (DAK Reguler)
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten (DAK Reguler) 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 81,44%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping) 94,01% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 92,96%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
3. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Penugasan)
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Penugasan) 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 83,57%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 99,91 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 96,47%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

5. **Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)**
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK) 67,41 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 62,39 % hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
6. **Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)**
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 94,68 % hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.
7. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas**
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas 96,97% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 54,65%, hal ini disebabkan :
 - a. Alat-alat yang akan di kalibrasi direncanakan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yaitu Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan (BPFK) dengan perkiraan tarif yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kemudian ada informasi di UPT Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi Kab. Pesisir Selatan bisa melakukan uji tera/kalibrasi terhadap alkes timbangan dacin dan timbangan digital, dimana biayanya jauh di bawah tarif BPFK Medan, sehingga realisasi keuangan lebih kecil dari rencana semula.
 - b. Dari semua alkes yang diusulkan puskesmas untuk di kalibrasi, ternyata tidak semuanya bisa dikalibrasi karena rusak, sehingga tidak semuanya dikenakan biaya.
 - c. Khusus alkes yang tidak bisa dibawa ke Dinas Kesehatan, hanya 7 puskesmas yang bisa dikunjungi oleh BPFK Medan karena keterbatasan waktu sehingga dana kalibrasi kurang terserap.
 - d. Untuk kalibrasi alat labor, BPFK Medan tidak mempunyai alat dan pihak swasta yang dihubungi tidak bisa melaksanakan sampai akhir tahun anggaran.
8. **Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK)**
Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK) 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 97,59 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

9. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Pajak Rokok) 99,08 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 77,43 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

l. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Dalam Pencapaian target kinerja Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dapat dilaksanakan 99,98 % dan untuk pencapaian kinerja keuangan 96,67 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) dapat dilaksanakan 100 % dengan realisasi keuangan 96,99 %, kendala pencairan dana tidak karena direalisasikan sesuai kebutuhan.

2. Pengadaan alat kesehatan covid 19 (pemulihan ekonomi akibat covid 19)

3. Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengadaan alat kesehatan covid 19 (pemulihan ekonomi akibat covid 19) dapat dilaksanakan 99,95 % dengan realisasi keuangan 96,01%, kendala pencairan dana tidak ada karena direalisasikan sesuai kebutuhan.

m. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dalam Pencapaian target kinerja Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan 99,11 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 92,53 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Pencapaian target kinerja Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 100 % dan Pencapaian realisasi keuangan pada kegiatan kemitraan asuransi kesehatan hanya 95,84 %, ini disebabkan karena keluarnya Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang perubahan Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, yang mana premi pembayaran PBI APBD yang semula Rp.42.000/jiwa menjadi Rp. 25.500/jiwa terhitung bulan Agustus 2020.

2. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (CHT Tahun 2020)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (CHT Tahun 2020) 5 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 0 %, Realisasi keuangan tidak dilaksanakan karena uangnya baru masuk ke DPA bulan Juni 2020 untuk pembayaran Premi PBI Masyarakat harus dijamin dari Januari sampai dengan Desember 2020 setiap tahunnya, sehingga masyarakat bisa dilayani dan tidak ada komplain kartunya tidak aktif nantinya.

3. ~~Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)~~

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 92,85 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 47,60 %, hal ini disebabkan karena awalnya dana jkn direncanakan untuk BLUD RSUD Tapan, tapi

RSUD Tapan sampai waktu yang direncanakan belum bisa melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD, maka diperubahan anggaran dialihkan kembali menjadi dana JKN, dan baru bisa direalisasikan di bulan Desember, selain itu karena RSUD Tapan meneriam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), maka jasa pelayanannya tidak direalisasikan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang TPP,

4. Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) JKN

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) JKN di RSUD Tapan 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 64,44%, hal ini disebabkan karena awalnya dana jkn direncanakan untuk BLUD RSUD Tapan, tapi RSUD Tapan sampai waktu yang direncanakan belum bisa melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD, maka diperubahan anggaran dialihkan kembali menjadi dana JKN, dan baru bisa direalisasikan di bulan Desember.

n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Dalam Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dapat dilaksanakan 66,61 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 35,92 %, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Pajak Rokok) 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 35,92%, hal ini disebabkan Pertemuan Lansia tidak terselenggara dikarenakan kondisi pandemi.

o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak

Dalam Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak dapat dilaksanakan 98,22% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 85,24%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak Rokok) 99,97 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 96,97 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

2. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia sekolah (Prasekdam Usek) (Pajak Rokok)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia sekolah (Pajak Rokok) 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 100 %, hal

ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

3. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik

Pencapaian target kinerja Kegiatan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik 98,20 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 85,04 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dalam Pencapaian target kinerja Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dapat dilaksanakan 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 83,56 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 77,69 %, hal ini disebabkan disebabkan karena untuk belanja pengadaan kit kolesterol dengan spesifikasi yang direncanakan tidak terseida, sementara untuk kegiatan tyang lain tidak ada kendala.

2. Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra

Kegiatan sudah dilaksanakan 100%, realisasi keuangan 100%.

Akibat adanya kejadian pandemi / wabah Covid-19, maka anggaran untuk kegiatan pemantauan dan penanggulangan masalah kesehatan matra dananya dialihkan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19

3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pencapaian target kinerja Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 96.86%.Tidak ada masalah dalam pencairan keuangan, tetapi untuk kegiatan ini tidak mencukupi, banyaknya kasus ganggua yang beu memiliki jaminan kesehatan,sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih agar masyarakat dengan ODGJ Berat yang merupakan tanggungan negara bisa dilayani sesuai standar.

q. Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Dalam Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dapat dilaksanakan 99,76% dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 96,79 %, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan
Pencapaian target kinerja Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan 96,70 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 99,76 %, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020
- r. **PROG. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD**
Dalam Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 94,08 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 86,12 %, hal ini disebabkan beberapa kegiatan pelaksanaannya tidak bisa dilakukan karena adanya pandemi covid-19 dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai berkebutuhan selama tahun anggaran 2020.
- s. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
Dalam Pencapaian target kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilaksanakan 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 97,35 %, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Pencapaian target kinerja kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 100 % dan untuk pencapaian target kinerja keuangan 95,67%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2020.

Formulir E.60

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan 4
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

no	Sasaran	Kode Relevan	Uraian Pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada ttr 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Direvisi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Kota s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Kota s.d Tahun 2021 (%)		Peningkat Daerah Pemangung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14-7+13		15-14x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.01.02.KESEHATAN			2,521,696,348,638		176,796,472,655		111,011,176,200		2,013,013,068		14,462,693,310		33,110,285,845		40,292,565,928		89,878,598,351		1,266,096,248,047			
1.1.1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	72.00		48.00		12.00		3.00		3.00		6.00		54.00		75.00						Dinas Kesehatan
		1.01.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi	72	22,134,365,896		5,377,540,938		2,301,038,061		422,240,692		496,090,176		956,710,028		647,028,548		2,164,059,444		7,541,600,372		34.07	
		1.01.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Kebutuhan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	72																				
		1.01.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kebutuhan jasa administrasi keuangan	72																				
		1.01.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	72																				
		1.01.02.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	72																				
		1.01.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor	72																				
		1.01.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72																				
		1.01.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen penerangan kantor	72																				
		1.01.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran anggaran koran	72																				
		1.01.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makan minum untuk harian, rapat dan tamu	72																				
		1.01.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya operasional perjalanan dinas luar daerah	72																				
		1.01.02.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya operasional perjalanan dinas dalam daerah	72																				
		1.01.02.01.01.30	Penunjang Operasional Pemantauan dan Pelaporan	TJumlah dokumen pemantauan dan laporan yang dihasilkan	48																				
		1.01.02.01.01.33	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Puskesmas	kebutuhan biaya operasional puskesmas	12																				
1.1.1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.01.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	72.00		48.00		12.00		3.00		3.00		6.00		54.00		75.00						Dinas Kesehatan
		1.01.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor Dirkes	72																				
1.1.1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.01.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase terpenuhinya kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar	95.00		95.00		2.00		0.50		0.50		6.50		85.50		90.00						Dinas Kesehatan
		1.01.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Penguasaan)	Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang didisalkan	95																				
		1.01.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang didisalkan	95																				
		1.01.02.01.16.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	90																				
		1.01.02.01.15.07	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)	Luncarnya pelaksanaan DAK ternasi	6																				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. Untuk melihat pencapaian indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel T-C. 30 dibawah ini:

LAPORAN BULANAN												
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN												
KEADAAN BULAN : Desember 2020												
No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.	
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD		
1	VI. DINAS KESEHATAN		114.013.053.161,00	4	98.983.682.042,37	6	86,82	7	8	9	10	11
			2.301.098.061		2.167.309.444	6	94,19	7	87,74	98,09		
	A. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		121.020.000		89.388.043	89.388.043	73,86	92,41	100,00	100,00		
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		121.020.000	Ska Wati Herli, SKM	89.388.043	89.388.043	73,86	92,41	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa			Yuni Andra, SKM	89.388.043	89.388.043	73,86	92,41	100,00	100,00		
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		123.137.590	Ska Wati Herli, SKM	105.022.100	105.022.100	85,29	97,54	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		123.137.590	Yuni Andra, SKM	105.022.100	105.022.100	85,29	97,54	100,00	100,00		
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100.690.620	Deriska Atni, Amd. Farm	94.770.200	94.770.200	94,12	91,86	100,00	100,00		
	a. Belanja Pegawai		73.200.000	Yuni Andra, SKM	70.800.000	70.800.000	96,72	91,67	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa		27.490.620		23.970.200	23.970.200	87,19	92,36	100,00	100,00		
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		131.500.000	Ska Wati Herli, SKM	131.483.500	131.483.500	99,99	91,76	100,00	100,00		
	a. Belanja Pegawai		130.000.000	Yuni Andra, SKM	130.000.000	130.000.000	100,00	91,67	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa		1.500.000		1.483.500	1.483.500	98,90	100,00	100,00	100,00		
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		10.670.000	Ska Wati Herli, SKM	10.261.000	10.261.000	96,17	91,67	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		10.670.000	Yuni Andra, SKM	10.261.000	10.261.000	96,17	91,67	100,00	100,00		
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor		22.440.750	Ska Wati Herli, SKM	22.439.500	22.439.500	99,99	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		22.440.750	Yuni Andra, SKM	22.439.500	22.439.500	99,99	100,00	100,00	100,00		
	7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		13.041.416	Ska Wati Herli, SKM	13.020.000	13.020.000	99,84	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		13.041.416	Yuni Andra, SKM	13.020.000	13.020.000	99,84	100,00	100,00	100,00		
	8. Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.849.310	Ska Wati Herli, SKM	3.843.000	3.843.000	99,84	90,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		3.849.310	Yuni Andra, SKM	3.843.000	3.843.000	99,84	90,00	100,00	100,00		
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.900.000	Ska Wati Herli, SKM	3.830.000	3.830.000	98,21	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		3.900.000	Yuni Andra, SKM	3.830.000	3.830.000	98,21	100,00	100,00	100,00		
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman		19.490.000	Lusy Ismael, SKM	19.469.450	19.469.450	99,89	95,77	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		19.490.000	Yuni Andra, SKM	19.469.450	19.469.450	99,89	95,77	100,00	100,00		
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		40.491.487	Lusy Ismael, SKM	36.441.487	36.441.487	90,00	98,02	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		40.491.487	Yuni Andra, SKM	36.441.487	36.441.487	90,00	98,02	100,00	100,00		
	12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		36.100.000	Lusy Ismael, SKM	31.105.000	31.105.000	86,16	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa		36.100.000	Yuni Andra, SKM	31.105.000	31.105.000	86,16	100,00	100,00	100,00		
	13. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		68.856.884	Lusy Ismael, SKM	60.638.250	60.638.250	88,06	70,38	100,00	100,00		
	a. Belanja Pegawai		34.150.000	Yuni Andra, SKM	32.900.000	32.900.000	96,34	91,67	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa		34.706.884		27.738.250	27.738.250	79,92	49,44	100,00	100,00		
	14. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Puskesmas		1.605.910.004		1.545.597.914	1.545.597.914	96,24	85,83	100,00	100,00		
	a. Belanja Pegawai		1.002.800.000		990.406.000	990.406.000	98,76	83,01	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa		603.110.004		555.191.914	555.191.914	92,05	90,51	100,00	100,00		
	B. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		76.100.000		74.667.000	74.667.000	98,12	49,42	100,00	100,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	a. Belanja Barang dan Jasa	76.100.000	Ska Wati Herli, SKM	74.667.000	74.667.000	98,12	99,42	100,00	-	
			39.000.000	Yuni Andra, SKM	39.000.000	39.000.000	100,00	91,67	100,00	-	
			37.100.000		35.667.000	35.667.000	- ,00	5,00	100,00	-	
C.	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1. Legalisasi dan Registrasi Tenaga Fungsional Kesehatan	8.767.650		8.767.650	8.767.650	100,00	100,00	100,00	-	
			8.767.650	Hasan Basri, Amd., Kep	8.767.650	8.767.650	100,00	100,00	100,00	-	
			2.000.000	Jafri Wandi, SKM, MT	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	-	
D.	PROG. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	1. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan (DAK Penugasan)	5.032.178.170		4.706.125.051	4.706.125.051	93,52	86,75	99,97	-	
			2.625.938.000	Fitria, S. Farm, Apt	2.504.011.921	2.504.011.921	95,36	75,00	100,00	-	
			2.625.938.000	Jafri Wandi, SKM, MT	2.504.011.921	2.504.011.921	95,36	75,00	100,00	-	
E.	PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pajak Rokok)	2.153.532.008	Fitria, S. Farm, Apt	1.967.091.880	1.967.091.880	91,34	100,00	100,00	-	
			2.153.532.008	Jafri Wandi, SKM, MT	1.967.091.880	1.967.091.880	91,34	100,00	100,00	-	
			234.918.162.000	Fitria, S. Farm, Apt	218.800.950	218.800.950	93,14	97,13	99,67	-	
F.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	42.817.942	Norhadi, SKM, MM	35.543.874	35.543.874	83,01	89,64	99,33	-	
			300.000	Vera Kornita, SKM, MM	-	-	- ,00	5,00	5,00	-	
			42.517.942		35.543.874	35.543.874	83,60	90,23	100,00	-	
G.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan Pengawasan Kesehatan Masyarakat	2.083.564.432		1.849.917.528	1.849.917.528	88,79	81,31	93,92	-	
			1.786.587.000		1.673.194.258	1.673.194.258	93,65	79,27	87,84	-	
			296.977.432		176.723.270	176.723.270	59,51	93,60	100,00	-	
H.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	22.421.476.638		18.500.711.920	18.500.711.920	82,51	47,68	92,50	-	
			9.223.593.638	Fitria, S. Farm, Apt	9.154.250.814	9.154.250.814	99,25	50,91	100,00	-	
			13.197.883.000	Jafri Wandi, SKM, MT	9.346.461.106	9.346.461.106	70,82	45,42	85,00	-	
I.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1. Peningkatan Pengawasan Kesehatan Masyarakat	216.221.500		31.937.550	31.937.550	14,77	16,25	21,44	-	
			1.054.500	Fitria, S. Farm, Apt	1.054.500	1.054.500	100,00	100,00	100,00	-	
			1.054.500	Jafri Wandi, SKM, MT	1.054.500	1.054.500	100,00	100,00	100,00	-	
J.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya DAK Non Fisik)	215.167.000		30.883.050	30.883.050	14,35	15,84	21,05	-	
			215.167.000	Fitria, S. Farm, Apt	30.883.050	30.883.050	14,35	15,84	21,05	-	
			215.167.000	Jafri Wandi, SKM, MT	30.883.050	30.883.050	14,35	15,84	21,05	-	
K.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	84.825.000		84.825.000	84.825.000	100,00	100,00	100,00	-	
			60.770.000	Hendri Agustian, S. Kep	60.770.000	60.770.000	100,00	100,00	100,00	-	
			60.770.000	Donny Tayes, SKM	60.770.000	60.770.000	100,00	100,00	100,00	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD		
	2	Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PSM) a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	24.055.000	Hendri Agustian, S. Kep	24.055.000	100,00	100,00	100,00	-			
			1.000.000	Donny Tayes, SKM	1.000.000	100,00	100,00	100,00	-			
			23.055.000		23.055.000	100,00	100,00	100,00	-			
H.	PROG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1. Peningkatan Gizi Masyarakat a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	58.737.980		54.710.200	93,14	58,14	95,74	-			
			58.737.980	Dewita,SKM,M. Biomed	54.710.200	93,14	58,14	95,74	-			
			17.000.000	Donny Tayes, SKM	16.500.000	- ,00	91,67	100,00	-			
			41.737.980		38.210.200	91,55	44,48	94,01	-			
I.	PROG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	395.623.453		392.252.728	99,15	89,23	99,92	-			
			313.792.950	Lendra Manita, SKM	313.742.950	99,98	99,67	100,00	-			
			7.200.000	Donny Tayes, SKM	7.200.000	100,00	91,67	100,00	-			
			306.592.950		306.542.950	99,98	99,86	100,00	-			
	2	Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) a. Belanja Barang dan Jasa	5.409.450	Lendra Manita, SKM	5.409.450	100,00	100,00	100,00	-			
			5.409.450	Donny Tayes, SKM	5.409.450	100,00	100,00	100,00	-			
	3	Pengelolaan Dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	22.713.125	Lendra Manita, SKM	22.142.400	- ,00	- ,00	- ,00	-			
			9.300.000	Donny Tayes, SKM	9.000.000	- ,00	4,84	96,77	-			
			13.413.125		13.142.400	- ,00	5,00	100,00	-			
	4	Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	53.707.928	Lendra Manita, SKM	50.957.928	94,88	62,76	100,00	-			
			51.600.000	Donny Tayes, SKM	48.850.000	94,67	61,24	100,00	-			
			2.107.928		2.107.928	100,00	100,00	100,00	-			
1.	PROG PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR		6.340.180.587		4.208.163.934	66,37	70,16	99,52	-			
	1	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Serta Penyakit Endemik / Epidemik a. Belanja Barang dan Jasa	363.237.687	dr. AL Laily Fitri	242.670.489	66,81	100,00	100,00	-			
			363.237.687	KADRIADI.SKM.MM	242.670.489	66,81	100,00	100,00	-			
	2	Peningkatan Imunisasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	76.677.409	dr. AL Laily Fitri	75.614.450	98,61	97,56	100,00	-			
			16.800.000	KADRIADI.SKM.MM	16.800.000	100,00	95,00	100,00	-			
			59.877.409		58.814.450	98,22	98,28	100,00	-			
	3	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	153.314.621	Zaidina Umar, SKM, MKM	107.930.950	70,40	79,18	100,00	-			
			6.000.000	KADRIADI.SKM.MM	6.000.000	100,00	91,67	100,00	-			
			147.314.621		101.930.950	69,19	78,67	100,00	-			
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana COVID-19 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	4.479.900.870	Fitria, S. Farm, Apt	2.971.860.270	66,34	67,01	99,80	-			
			9.600.000	Jafri Wandu, SKM, MT	-	- ,00	5,00	5,00	-			
			4.307.820.100		2.841.362.770	65,96	65,90	100,00	-			
	5	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Penanggulangan Covid-19) a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	162.480.770		130.497.500	80,32	100,00	100,00	-			
			1.267.050.000	dr. AL Laily Fitri	810.087.775	63,93	70,00	98,33	-			
			750.000.000	KADRIADI.SKM.MM	363.225.000	48,43	58,33	100,00	-			
	1.	Akdreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan(Pendamping) a. Belanja Pegawai	517.050.000		446.862.775	86,43	86,92	95,90	-			
			1.613.575.196		810.087.775	63,93	70,00	98,33	-			
			101.510.786		92.723.800	91,34	98,08	100,00	-			
	K.	PROG STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN a. Belanja Pegawai	23.400.000	Welidwita, Amd. Keb	23.400.000	100,00	91,67	100,00	-			

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d Target s/d bl YAD	
	b. Belanja Barang dan Jasa		78.110.786	Vera Komita, SKM, MM	69.323.800	69.323.800	88,75	100,00	100,00	
2.	Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (DAK Non Fisik)		1.479.080.000	Weldevita, And. Keb	307.619.800	307.619.800	20,80	28,22	43,27	-
	a. Belanja Barang dan Jasa		1.479.080.000	Vera Komita, SKM, MM	307.619.800	307.619.800	20,80	28,22	43,27	-
3	Pengelolaan Dan Pembinaan Pegawai		15.850.000	Ska Wati Herli, SKM	14.050.000	14.050.000	88,64	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai		14.250.000	Yuni Andra, SKM	13.500.000	13.500.000	94,74	100,00	100,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa		1.600.000		550.000	550.000	34,38	37,66	37,66	
4	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Dan Institusi Kesehatan		17.134.410	Nofriadi, SKM, MM	10.523.650	10.523.650	61,42	91,65	91,65	-
	a. Belanja Barang dan Jasa		17.134.410	Vera Komita, SKM, MM	10.523.650	10.523.650	61,42	83,43	83,43	-
L.	PROG PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA		28.646.528.245		26.607.746.076	26.607.746.076	92,88	72,45	96,93	-
1.	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten (DAK Reguler)		506.000.000	Fitria Yomi Swadharma, SKM	412.103.200	412.103.200	81,44	100,00	100,00	
	b. Belanja Modal		506.000.000	Jafril Wandi, SKM, MT	412.103.200	412.103.200	81,44	100,00	100,00	
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)		13.081.745.000	Fitria Yomi Swadharma, SKM	12.161.228.500	12.161.228.500	92,96	82,28	94,01	
	a. Belanja Modal		13.081.745.000	Jafril Wandi, SKM, MT	12.161.228.500	12.161.228.500	92,96	82,28	94,01	
3	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Penugasan)		1.468.150.499	Fitria Yomi Swadharma, SKM	1.241.647.480	1.241.647.480	84,57	60,26	100,00	
	c. Belanja Modal		1.468.150.499		1.241.647.480	1.241.647.480	84,57	60,26	100,00	
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya		3.665.079.489	Fitria Yomi Swadharma, SKM	3.535.770.900	3.535.770.900	96,47	99,79	99,91	
	a. Belanja Modal		3.665.079.489	Jafril Wandi, SKM, MT	3.535.770.900	3.535.770.900	96,47	99,79	99,91	
5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)		277.960.057	Fitria Yomi Swadharma, SKM	173.416.200	173.416.200	62,39	55,15	67,41	
	a. Belanja Modal		277.960.057	Jafril Wandi, SKM, MT	173.416.200	173.416.200	62,39	55,15	67,41	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)		9.240.100.000	Fitria Yomi Swadharma, SKM	8.733.315.000	8.733.315.000	94,52	50,10	100,00	
	a. Belanja Modal		9.240.100.000	Jafril Wandi, SKM, MT	8.733.315.000	8.733.315.000	94,52	50,10	100,00	
7.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alat Kesehatan Puskesmas		40.000.000	Fitria Yomi Swadharma, SKM	21.858.000	21.858.000	54,65	5,00	96,97	
	a. Belanja Barang dan Jasa		40.000.000	Jafril Wandi, SKM, MT	21.858.000	21.858.000	54,65	5,00	96,97	
8	Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK)		217.493.200	Fitria, S. Faim, Apt	212.259.400	212.259.400	97,59	5,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa		217.493.200	Jafril Wandi, SKM, MT	212.259.400	212.259.400	97,59	5,00	100,00	
9	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Pajak Rokok)		150.000.000	Fitria Yomi Swadharma, SKM	116.147.396	116.147.396	77,43	99,08	99,08	
	a. Belanja Modal		150.000.000	Jafril Wandi, SKM, MT	116.147.396	116.147.396	77,43	99,08	99,08	
M.	PROG. PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU - PARU/ RUMAH SAKIT MATA		1.591.296.087		1.538.297.101	1.538.297.101	96,67	51,89	99,98	-
1.	Pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit (DAK)		1.065.996.087	Muktar Lovi, ST	1.033.944.886	1.033.944.886	96,99	75,00	100,00	-
	a. Belanja Modal		1.065.996.087	dr. Effrina Mirna	1.033.944.886	1.033.944.886	96,99	75,00	100,00	-
2	Pengadaan alat kesehatan covid 19 (pemulihan ekonomi akibat covid 19)		525.300.000	Muktar Lovi, ST	504.352.215	504.352.215	96,01	5,00	99,95	-
	a. Belanja Pegawai		300.000	dr. Effrina Mirna	-	-	,00	5,00	5,00	-
	a. Belanja Modal		525.000.000	dr. Effrina Mirna	504.352.215	504.352.215	96,07	5,00	100,00	-
N.	PROG KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		10.314.940.628		9.544.415.638	9.544.415.638	92,53	92,64	99,11	-

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1.	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	a. Belanja Pegawai	9.519.158.778	Ludya Hasda, SKM	9.123.184.300	9.123.184.300	95,84	99,97	100,00	-	
			13.200.000	Vera Kornita, SKM, MM	12.800.000	12.800.000	96,97	91,67	100,00	-	
			9.505.958.778		9.110.384.300	9.110.384.300	95,84	99,98	100,00	-	
2	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (CHT Tahun 2020)	a. Belanja Pegawai	78.870.000	Ludya Hasda, SKM	-	-	- ,00	5,00	5,00	-	
			78.870.000	Vera Kornita, SKM, MM	-	-	- ,00	5,00	5,00	-	
3	pelayanan kesehatan(kapitasi)jaminan kesehatan nasional (jkn)	a. Belanja Pegawai	241.911.850	Ns.Doni Efrharma, S.kep	115.147.958	115.147.958	47,60	5,00	92,85	-	
			145.147.110	dr. Effrina Mirna	48.454.658	48.454.658	33,38	5,00	100,00	-	
			86.764.740		56.693.300	56.693.300	65,34	5,00	69,35	-	
4	pelayanan kesehatan(non kapitasi)jaminan kesehatan nasional (jkn)	a. Belanja Pegawai	475.000.000	Ns.Doni Efrharma, S.kep	306.083.380	306.083.380	64,44	5,00	100,00	-	
			248.538.229	dr. Effrina Mirna	185.636.180	185.636.180	74,69	5,00	100,00	-	
			226.461.771		120.447.200	120.447.200	53,19	5,00	100,00	-	
O.	PROG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	7.593.000	Dewita,SKM,M. Blomed	2.727.700	2.727.700	35,92	41,79	66,61	-	
			7.593.000	Donny Tayes, SKM	2.727.700	2.727.700	35,92	41,79	66,61	-	
			1.092.371.250		931.169.221	931.169.221	85,24	86,36	98,22	-	
P.	PROG PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN & ANAK	1. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak	17.220.500	Dewita,SKM,M. Blomed	16.578.000	16.578.000	96,27	31,04	99,07	-	
			17.220.500	Donny Tayes, SKM	16.578.000	16.578.000	96,27	31,04	99,07	-	
			1.817.750	Dewita,SKM,M. Blomed	1.817.750	1.817.750	100,00	100,00	100,00	-	
3.	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan)	DAK Non Fisik	1.073.333.000	Donny Tayes, SKM	912.773.471	912.773.471	85,04	87,22	98,20	-	
			868.468.000	Dewita,SKM,M. Blomed	767.201.027	767.201.027	88,34	91,67	100,00	-	
			204.865.000	Donny Tayes, SKM	145.572.444	145.572.444	71,06	68,35	90,58	-	
Q.	PROG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	1. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	122.525.730	Aswiliarti, SKM	102.384.650	102.384.650	83,56	97,73	100,00	-	
			85.706.277	KADRIADI,SKM,MM	66.589.500	66.589.500	77,70	97,55	100,00	-	
2	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra	a. Belanja Pegawai	6.000.000	KADRIADI,SKM,MM	6.000.000	6.000.000	100,00	91,67	100,00	-	
			79.706.277	Zadina Umar, SKM, MKM	60.589.500	60.589.500	76,02	98,00	100,00	-	
			4.128.550	KADRIADI,SKM,MM	4.128.550	4.128.550	100,00	100,00	100,00	-	
3	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	a. Belanja Pegawai	32.690.903	Aswiliarti, SKM	31.666.600	31.666.600	96,87	97,91	100,00	-	
			32.690.903	KADRIADI,SKM,MM	31.666.600	31.666.600	96,87	97,91	100,00	-	
R.	PROG. PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	1. Operasional Pelayanan RSU Pertama Tapan	5.015.001.000	Idris, SKM	4.849.701.380	4.849.701.380	96,70	86,04	99,76	-	
			5.015.001.000	dr. Effrina Mirna	3.234.242.918	3.234.242.918	96,89	91,58	99,89	-	
			3.338.090.000		1.207.186.095	1.207.186.095	95,39	79,87	99,34	-	
S	PROG. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	1. Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	26.498.777.612		22.820.653.197,0	22.820.653.197	86,12	80,58	94,08	-	
			26.498.777.612		15.989.883.755	15.989.883.755	90,74	87,28	100,00	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		KET.
						Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	6.045.455,031		5.021.176.396	83,06	89,14	97,24		
	c.	Belanja Modal	2.832.102.168		1.809.593.046	63,90	65,31	85,00		
T	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		48.853.000		46.737.950	95,67	91,67	100,00	-	
	1.	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	48.853.000	Ska Wati Herli, SKM	46.737.950	95,67	91,67	100,00	-	
	a.	Belanja Pegawai	36.600.000	Yuni Andira, SKM	36.600.000	100,00	91,67	100,00	-	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	12.253.000		10.137.950	82,74	91,67	100,00	-	
	J U M L A H		114.013.053.161,00		98.983.682.042	86,82	73,19	90,58		

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai setiap tahunnya, beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV

Terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, diantaranya :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T yaitu: Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara. Capaian Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil pada tahun 2020 sebesar 84,75 % menurun dari capaian tahun lalu yaitu 98 %. Hal ini terjadi karena sasaran yang ditetapkan oleh pusdatin tinggi dari data real yang ada di lapangan, padahal saat ini akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan sudah sangat baik dan tetap perlu terus dipertahankan dan dijaga mutu/kualitas layanannya

2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu: Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan Klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

Target kinerja tahun 2020 adalah sebesar 100%, jumlah persalinan yang ditolong pada pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan adalah sebanyak 9630 orang dibandingkan dengan sasaran 10.088 ibu bersalin maka didapat cakupan sebesar 86.78 %. Pada tahun 2020 data sasaran yang akan digunakan adalah data real berdasarkan data PIS-PK. Selain itu data persalinan di wilayah kerja yang melahirkan di luar wilayah masih ada yang belum tercatat oleh Petugas Puskesmas.

3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis

Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Sedangkan standar kualitas meliputi:

- Pelayanan Neonatal 0-6 jam
 - a. Pemotongan tali pusat
 - b. IMD
 - c. Vit K1
 - d. Pemberian salep mata
 - e. Injeksi HB0
- Pelayanan Neonatal 6 jam-28 hari
 - a. Konseling perawatan BBL dan ASI eksklusif
 - b. MTBM
 - c. Vit K bagi yang belum
 - d. Imunisasi HB0 untuk usia < 24 jam
 - e. Penanganan rujukan bagi kasus neonatal dan komplikasi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar oleh tenaga kesehatan diseluruh sarana pelayanan kesehatan 99,40%, dari jumlah sasaran 9171.

4. Pelayanan Kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registrer (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pelayanan Kesehatan 0-11 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - e. IDL
- Pelayanan Kesehatan 12-23 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A dalam 2 x setahun
 - e. Pemberian IDL lanjutan
- Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A sebanyak 2 x setahun
- Pemantauan perkembangan balita
- Pemantauan kapsul Vit A
- IDL
- Imunisasi lanjutan
- Pengukuran BB dan TB
- Edukasi dan informasi

Target kinerja cakupan pelayanan kesehatan anak balita tahun 2020 sama dengan target nasional (SPM) yaitu sebesar 100%. Jumlah anak balita yang mendapat pelayanan tumbuh kembang sebanyak 72,26% dari jumlah sasaran 45078 balita.

5. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.

Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkauan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
- Pemeriksaan TD
- Pemeriksaan gula darah
- Anamnesa perilaku beresiko

Target kinerja tahun 2020 sebesar 100%, target ini sesuai target nasional SPM tahun 2020 yaitu 100%. Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang diperiksa kesehatannya sebanyak 84,21%.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.

Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining Kesehatan usia 15-59 tahun, meliputi:

- Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
- Pengukuran TD
- Pemeriksaan gula darah
- Anamnesa perilaku beresiko

Jumlah sasaran di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 berjumlah 290.866 orang dan jumlah warga yang mendapatkan skrining kesehatan pada tahun ini sebanyak 21,18%.

7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan

minimal dilakukan sekali setahun. Skrining kesehatan sesuai standar meliputi:

- Pengukuran TB, BB, dan lingkar perut
- Pengukuran TD
- Pemeriksaan gula darah
- Pemeriksaan gangguan mental
- Pemeriksaan gangguan kognitif
- Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- Anamnesa perilaku beresiko

Sasaran jumlah penduduk tahun 2020 dengan usia 60 tahun keatas sebanyak 49.472 orang dengan jumlah penduduk yang dilakukan skrining kesehatan pada tahun 2020 sebesar 70,75%.

8. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Mellitus dan Gagal ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi:

- Pengukuran TD dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasyankes
- Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat
- Rujukan bila diperlukan

Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktusatu tahun pada tahun 2020 sebanyak 81.432 orang dengan jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 24,52%.

9. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus

sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi:

- Pengukuran gula darah
- Edukasi
- Terapi farmakologi

Jumlah estimasi penderita DM berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2020 sebanyak 1035 orang dengan jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 87,67.

10. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- a. Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- b. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- a. Pemeriksaan status mental
- b. Wawancara

Jumlah ODGJ nerat yang ada di wilayah kerja berjumlah 993 orang dan jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 97,67%.

11. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di

FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:

- a) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat di dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- b) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- c) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotive dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian factor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati sampai sembuh).

Pemeriksaan pelayanan Kesehatan TB sesuai standar meliputi:

- Pemeriksaan klinis
- Pemeriksaan penunjang
- Edukasi

Pada tahun 2020 Jumlah orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar adalah 121,7%.

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang ditetapkan.
- Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.

Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga permasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Pada tahun 2020 Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Fayankes dalam kurun waktu satu tahun adalah sebesar 24,7%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Adapun isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan antara lain adalah:

1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Percepatan perbaikan status gizi
3. Pengendalian penyakit dan penyehatan Lingkungan
4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang Berkualitas
5. Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
6. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
7. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
8. Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan dan sistem informasi
9. Pengembangan dan peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan
10. Pengembangan SJSN-kesehatan

Dari beberapa isu strategis diatas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan periode tahun 2020.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Solok terdapat 19 (sembilan belas) Program / Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Pengawasan Obat dan Makanan
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
17. Program Pengembangan Peningkatan, Pemantapan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
18. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

19. Program Peningkatan Pelayanan

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan maka pada tahun 2021 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dimana didalamnya terdapat 18 (delapan belas) program dapat dilihat pada tabel T-C. 31 berikut ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat ;
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan.

Sementara sasaran strategis Dinas Kesehatan Propinsi sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan tujuan pertama “Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan”, maka ditetapkan sasaran :
 - a. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran :
 - Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 20 puskesmas pada tahun 2022
 - Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 2 rumah sakit pada tahun 2022
2. Dalam mewujudkan tujuan kedua yaitu “Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit. “, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran:

- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun sebesar 25,6 % pada tahun 2021
 - Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF) menjadi 100 % pada tahun 2021.
 - Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar menjadi 100% pada tahun 2021.
- b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator sasaran :
- Jumlah Kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan menjadi 100 % pada tahun 2021
3. Dalam mewujudkan tujuan keempat yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif “, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indicator sasaran :
- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi BB pada tahun 2021
4. Dalam mewujudkan tujuan keempat yaitu “Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional“, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan Indikator Sasaran :
- Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
- Isu strategis pembangunan kesehatan di Sumatera Barat berdasarkan RPJMD perubahan Provinsi Sumatera Barat adalah aksesibilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020, dimana baik kebijakandi tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupatendiharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaanpembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

TABEL VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesik, Sektan

No	TUTUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (TOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				TARGE T	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kab. Pesik Selatan	1. Menurunkan Angka Kematian pada kelompok rentan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UHI	70,86	71,11		71,36		71,61		72,11		72,36		72,38		72,38			
							2,5	121.127.002.053	2,5	134.881.108.753	2,5	145.146.739.188	2,5	150.397.739.188	2,5	153.815.739.188	2,5	158.386.739.188	2,5	158.441.739.188		
							20 unit	74.609.896.575	23 unit	85.409.896.575	20 unit	89.525.000.000	20 unit	92.580.000.000	20 unit	94.760.000.000	20 unit	97.770.000.000	20 unit	97.775.000.000		
							0%	-	1 Unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000		
							6 unit	2.000.000.000	6 unit	2.000.000.000	5 unit	2.500.000.000	6 unit	2.500.000.000	4 unit	2.500.000.000	8 unit	3.000.000.000	8 unit	3.000.000.000		
							0%	-	1 Unit	800.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000				
							7 unit	21.000.000.000	7 unit	21.000.000.000	8 unit	22.000.000.000	10 unit	22.000.000.000	12 unit	22.000.000.000	14 unit	22.000.000.000	14 unit	22.000.000.000		
							4 unit	2.000.000.000	4 unit	2.000.000.000	5 unit	2.500.000.000	6 unit	3.000.000.000	7 unit	3.050.000.000	8 unit	3.100.000.000	8 unit	3.100.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGE T	Rp.			TARGE T	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.						
				6 Rehabilitasi dan Peneliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi	4 unit	1.000.000.000	4 unit	1.000.000.000	6 unit	1.200.000.000	5 unit	1.230.000.000	5 unit	1.250.000.000	6 unit	1.500.000.000	6 unit	1.500.000.000					
				7 Pengadaan Pasiran dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pasiran dan Pendukung diberikan (Anubalances, Genaset, IPL, Air Bersih, Anubalances Roda 2)	57 unit	25.129.300.000	57 unit	25.129.300.000	60 unit	26.000.000.000	60 unit	27.000.000.000	60 unit	28.000.000.000	60 unit	29.000.000.000	60 unit	29.000.000.000					
				8 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan yang diadakan	2 paket	17.000.000.000	2 paket	17.000.000.000	2 paket	17.500.000.000	2 paket	18.000.000.000	2 paket	18.500.000.000	2 paket	19.000.000.000	2 paket	19.000.000.000					
				9 Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	2 paket	3.478.065.750	2 paket	3.478.065.750	2 paket	4.000.000.000	2 paket	4.500.000.000	2 paket	5.000.000.000	2 paket	5.500.000.000	2 paket	5.500.000.000					
				10 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket Bahan Habis Pakai yang diadakan	1 Paket	2.802.530.825	1 Paket	2.802.530.825	1 Paket	3.000.000.000	1 Paket	3.500.000.000	1 Paket	3.600.000.000	1 Paket	3.800.000.000	1 Paket	3.800.000.000					
				11 Peneliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	225.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	255.000.000	1 paket	260.000.000	1 paket	260.000.000					
				12 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BSHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ketersediaan distribusi obat dan perlengkapan kesehatan	12 bulan	82.194.850	12 bulan	82.194.850	12 bulan	100.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	135.000.000					
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPK Kesehatan yang mencapai target	100%	46.253.105.178	100%	49.206.653.728	100%	55.586.739.188	100%	57.474.739.188	100%	58.700.739.188	100%	60.251.739.188	100%	60.301.739.188					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENYANGGUNGJAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
				1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase K1 dan K4		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		
				2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin		100%	4.210.588.000	100%	4.210.588.000	100%	5.000.000.000	100%	5.300.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.600.000.000	100%	5.600.000.000		
				3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir		100%	803.042.600	100%	803.042.600	100%	900.000.000	100%	905.000.000	100%	920.000.000	100%	925.000.000	100%	925.000.000		
				4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balin	Persentase pelayanan kesehatan pada balin		100%	128.521.300	100%	128.521.300	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
				5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak dan usia yang diberikan pelayanan kesehatan		60%	128.721.300	60%	128.721.300	100%	200.000.000	100%	205.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000		
				6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif		100%	394.067.100	100%	394.067.100	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000		
				7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan		80%	130.271.300	80%	130.271.300	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000		
				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	260.000.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERA SI LOKA						
							2021			2022			2023			2024			2025			2026			TARGE T	Rp.	
							TARGET	Rp.	TARGET	TARGET	Rp.	TARGET	TARGET	Rp.	TARGET	TARGET	Rp.	TARGET	TARGET	Rp.		TARGET	TARGET	Rp.			
				9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus		100%	250.000.000	100%	100%	250.000.000	100%	100%	255.000.000	100%	100%	260.000.000	100%	100%	265.000.000	100%	100%	270.000.000	100%	100%	270.000.000	
				10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat		100%	100.000.000	100%	100%	100.000.000	100%	100%	150.000.000	100%	100%	155.000.000	100%	100%	160.000.000	100%	100%	165.000.000	100%	100%	165.000.000	
				11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberculosis	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan terduga tuberculosis		100%	69.085.500	100%	100%	69.085.500	100%	100%	70.000.000	100%	100%	75.000.000	100%	100%	80.000.000	100%	100%	85.000.000	100%	100%	85.000.000	
				12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko HIV		100%	55.469.580	100%	100%	55.469.580	100%	100%	70.000.000	100%	100%	75.000.000	100%	100%	80.000.000	100%	100%	85.000.000	100%	100%	85.000.000	
				13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase desa / nagari yang mengehkan KLB wabala ditanggulangi < 24 jam		90%	100.000.000	90%	90%	100.000.000	90%	90%	105.000.000	90%	90%	110.000.000	90%	90%	115.000.000	90%	90%	120.000.000	90%	90%	120.000.000	
				14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	Persentase desa / nagari yang mengehkan bencana ditanggulangi masalah kesehatan dan penanganan Covid-19		100%	5.739.739.188	100%	100%	5.739.739.188	100%	100%	5.739.739.188	100%	100%	5.739.739.188	100%	100%	5.739.739.188	100%	100%	5.739.739.188	100%	100%	5.739.739.188	
				15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balin gizi buruk dan buni KEK yang mendapat pelayanan kesehatan		100%	4.011.330.380	100%	100%	4.011.330.380	100%	100%	5.000.000.000	100%	100%	5.000.000.000	100%	100%	5.000.000.000	100%	100%	5.000.000.000	100%	100%	5.000.000.000	
				16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang menaruh pos UKK dan kelengkapan obat raga	20	Puskesmas	217.721.500	21	Puskesmas	217.721.500	21	Puskesmas	300.000.000	21	Puskesmas	305.000.000	21	Puskesmas	310.000.000	21	Puskesmas	315.000.000	21	Puskesmas	315.000.000	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				UNIT KERJA SKPD PENGANGGIAN WAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGE I	Rp.			TARGE I	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGE I	Rp.	TARGE I	Rp.	TARGE I	Rp.	TARGE I	Rp.						
				17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen kajian lingkungan sehat	8 Dokumen	500.000.000	6 Dokumen	523.397.150	7 Dokumen	600.000.000	8 Dokumen	650.000.000	9 Dokumen	700.000.000	10 dokumen	750.000.000							
				18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	media promosi yang diadkan	2 Paket	134.000.000	3 paket	134.000.000	4 paket	150.000.000	5 paket	155.000.000	6 paket	160.000.000	7 paket	165.000.000							
				19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan	20 Puskesmas	47.500.000	21 Puskesmas	47.500.000	21 Puskesmas	50.000.000	21 Puskesmas	50.000.000	21 Puskesmas	50.000.000	21 Puskesmas	50.000.000							
				20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan surveillance epidemiologi, penemuan dan penanggulangan wabah	20 Puskesmas	150.000.000	21 Puskesmas	150.000.000	21 Puskesmas	155.000.000	21 Puskesmas	160.000.000	21 Puskesmas	165.000.000	21 Puskesmas	170.000.000							
				21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODMK yang mendapatkan pelayanan kesehatan	50%	75.000.000	50%	100.000.000	55%	120.000.000	60%	125.000.000	65%	150.000.000	70%	160.000.000							
				22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase insidensi sekolah yang mempunyai kebijakan KTR	50%	300.000.000	55%	311.866.100	60%	315.000.000	65%	320.000.000	70%	325.000.000	75%	330.000.000							
				23 Pengelolaan Gynya Kesehatan Klinis	Jumlah event-event daerah dan Puskesmas	20 event	838.147.730	20 event	838.147.730	20 event	900.000.000	20 event	1.000.000.000	20 event	1.000.000.000	20 event	1.000.000.000							
				24 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase bayi yang mendapat amnisiisasi dasar lengkap (IDL)	80%	600.000.000	82%	608.560.000	85%	700.000.000	87%	702.000.000	88%	705.000.000	90%	710.000.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Uraian Sasaran, Matriks Program, Kegiatan, dan Kegiatan (Output))	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI											
							2021				2022				2023				2024				2025				2026						
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
				25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan masyarakat	28.760 peserta	12.500.000.000	28.760 peserta	12.500.000.000	28.760 peserta	13.000.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000		
				26. Deteksi Dini Penyakit Menular NAFZA di Fayuntes dan Sekolah	Persentase deteksi dini Nafza di sekolah	30%	80.000.000	50%	125.000.000	70%	127.000.000	75%	128.000.000	80%	130.000.000	85%	132.000.000	90%	132.000.000	90%	132.000.000	90%	132.000.000	90%	132.000.000	90%	132.000.000	90%	132.000.000	90%	132.000.000	90%	132.000.000
				27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Persentase pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan berdasarkan target	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	86.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000
				28. Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah Kabupaten dan Kecamatan sehat yang dibuat	1 Kab dan 15 Kecamatan	350.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	400.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	420.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	425.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	430.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000
				29. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan dasar terpadu	20 Puskesmas	1.750.000.000	20 Puskesmas	1.750.000.000	21 Puskesmas	2.000.000.000	21 Puskesmas	2.300.000.000	21 Puskesmas	2.400.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000
				30. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama	3 Puskesmas	2.500.000.000	4 Puskesmas	2.540.025.000	5 Puskesmas	3.000.000.000	6 Puskesmas	3.400.000.000	7 Puskesmas	3.500.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000	8 Puskesmas	3.600.000.000
				31. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase ledengapan dan ketepatan laporan menggunakan SKDR dan alat yang tersedia	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000
				32. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSTU Tayan)	Ketersediaan biaya operasional RST Tayan	12 bulan	750.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUGAS SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA		UNIT KERJA SKPD PENGUNGJIAN WAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				TARGE T	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
				33. Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Tapan)	Ketersediaan biaya operasional RSUD Tapan	12 bulan	7.000.000.000	12 bulan	10.000.000.000	12 bulan	11.000.000.000	12 bulan	11.500.000.000	12 bulan	12.000.000.000	12 bulan	13.000.000.000	12 bulan	13.000.000.000			
				34. Operasional Pelayanan Puskesmas	Ketersediaan biaya operasional Puskesmas	20 Puskesmas	2.000.000.000	20 Puskesmas	1.694.400.000	21 Puskesmas	3.000.000.000	21 Puskesmas	3.050.000.000	21 Puskesmas	3.100.000.000	21 Puskesmas	3.120.000.000	21 Puskesmas	3.120.000.000			
				Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah profil kesehatan yang dihasilkan	1 Dokumen	114.000.000	1 Dokumen	114.558.450	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	178.000.000	1 Dokumen	182.000.000	1 Dokumen	188.000.000	1 Dokumen	188.000.000			
			1	Pengelolaan Dan dan Informasi Kesehatan	Jumlah profil kesehatan yang dihasilkan	1 Dokumen	114.000.000	1 Dokumen	114.558.450	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	116.000.000	1 Dokumen	117.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000			
			2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Ketersediaan Sistem e-Health obot	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.245.000	12 bla	60.000.000	12 bla	62.000.000	12 bla	65.000.000	12 bla	68.000.000	12 bla	68.000.000			
				Perbaikan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki persentase rujukan sesuai dengan standar KBK	8 Puskesmas	150.000.000	8 Puskesmas	150.000.000	10 Puskesmas	160.000.000	12 Puskesmas	165.000.000	14 Puskesmas	173.000.000	16 Puskesmas	177.000.000	16 Puskesmas	177.000.000			
			1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Mutu Pelayanan Puskesmas	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	108.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	110.000.000			
			2	Peningkatan kemampuan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Puskesmas yang memiliki persentase rujukan sesuai dengan standar KBK	10%	50.000.000	10%	50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		67.000.000		67.000.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGE T	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
		2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	30 orang	300.000.000	30 orang	400.000.000	30 orang	402.000.000	30 orang	405.000.000	30 orang	410.000.000	30 orang	415.000.000	30 orang	415.000.000			
				Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	30 orang	100.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000			
				1. Pengembangan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah rekomendasi izin operasional Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan	50 bh	50.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000			
				2. Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan serta Tidak Lajut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan yang dibina	800 Pegawai	50.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000			
				Perencanaan Kelahiran dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000			
				1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80 org	100.000.000	80 org	100.000.000	80 org	102.000.000	80 org	105.000.000	80 org	110.000.000	80 org	115.000.000	80 org	115.000.000			
				1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80 org	100.000.000	80 org	100.000.000	80 org	102.000.000	80 org	105.000.000	80 org	110.000.000	80 org	115.000.000	80 org	115.000.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT/COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REGISTRASI			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80 org	209.000.000	80 org	765.549.196	80 org	240.000.000	80 org	255.000.000	80 org	265.000.000	80 org	275.000.000	80 org	275.000.000					
				Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80 org	209.000.000	80 org	209.475.000	80 org	240.000.000	80 org	255.000.000	80 org	265.000.000	80 org	275.000.000	80 org	275.000.000					
			1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan petizium apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optik, usaha mikro obat tradisional (umot)	Ketersediaan Penerimaan dan Pengawasan	12 bulan	9.600.000	12 bulan	9.475.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000					
			2	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan petizium apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optik, usaha mikro obat tradisional (umot)	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80%	200.000.000	80%	200.000.000	80%	230.000.000	80%	240.000.000	80%	245.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000					
				penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan / restoran dan depot air minum (dam)	Penerbitan sertifikat laik sehat depot air minum	20 depot	350.000.000	20 depot	389.723.600	30 depot	340.000.000	35 depot	350.000.000	40 depot	360.000.000	45 depot	370.000.000	45 depot	370.000.000					
			1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan dan depot air minum	Penerbitan sertifikat laik sehat depot air minum	20 depot	350.000.000	20 depot	389.723.600	30 depot	340.000.000	35 depot	350.000.000	40 depot	360.000.000	45 depot	370.000.000	45 depot	370.000.000					
3. Meningkatkan Kemampuan Masyarakat untuk hidup sehat				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Nagari ber-PHBS	80%	500.000.000	80%	556.074.196		562.000.000		615.000.000		700.000.000		760.000.000		760.000.000					
				Advokasi, pemberdayaan , pembinaan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota	persentase ketersediaan media promosi	80%	300.000.000	80%	311.355.340		312.000.000		315.000.000		350.000.000		360.000.000		360.000.000					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENGANGGARAN WAB	LOKASI
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGE T	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.				
				1. Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	persentase ketersediaan media promosi	60%	300.000.000	60%	311.355.340		312.000.000		315.000.000		350.000.000		360.000.000	%	360.000.000			
				Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Nagari ber-PHBS	60%	200.000.000	60%	244.718.856	65%	250.000.000	70%	300.000.000	75%	350.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000			
			1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Nagari ber-PHBS	60%	200.000.000	60%	244.718.856	65%	250.000.000	70%	300.000.000	75%	350.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000			
4. Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Dinas Kesehatan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	95.224.405.000	12 bulan	96.253.045.000	12 bulan	100.422.000.000	12 bulan	102.139.500.000	12 bulan	103.158.000.000	12 bulan	99.807.000.000	12 bulan	99.807.000.000			
				PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan	34 dokumen	220.000.000	34 dokumen	229.600.000	34 dokumen	230.000.000	34 dokumen	230.000.000	34 dokumen	230.000.000	34 dokumen	234.000.000	34 dokumen	234.000.000			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	129.600.000	10 dokumen	130.000.000	10 dokumen	130.000.000	10 dokumen	130.000.000	10 dokumen	132.000.000	10 dokumen	132.000.000			
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dihasilkan	24 dokumen	100.000.000	24 dokumen	100.000.000	24 dokumen	100.000.000	24 dokumen	100.000.000	24 dokumen	100.000.000	24 dokumen	102.000.000	24 dokumen	102.000.000			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan gaji dan operasional keuangan	12 bulan	68.500.000.000	12 bulan	69.500.000.000	12 bulan	73.500.000.000	12 bulan	75.500.000.000	12 bulan	76.500.000.000	12 bulan	73.135.000.000	12 bulan	73.135.000.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI																														
							2021						2022								2023						2024						2025						2026						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.										
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji PNS Dinas Keseluruhan	14 bulan	14 bulan	65.000.000.000	14 bulan	66.000.000.000	14 bulan	70.000.000.000	14 bulan	72.000.000.000	14 bulan	73.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000																
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honor-honor ASN Dinas Keseluruhan dan 20 Puskesmas	12 bulan	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000																
				Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	3 orang	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000																
				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	3 orang	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000																
				Peningkatan pelayanan BLUD	Ketersediaan operasional Puskesmas	12 bln	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000																
				1. Pelayanan dan pemungut pelayanan BLUD	Ketersediaan operasional Puskesmas	12 bln	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000																
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan operasional kantor	12 bulan	12 bulan	378.870.000	12 bulan	378.870.000	12 bulan	480.000.000	12 bulan	484.500.000	12 bulan	487.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000																
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000																

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENGANGGARAN WAB	LOKASI										
							2021			2022			2023			2024					2025			2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							TARGET	Rp.	TARGE I	TARGET	Rp.	TARGE I	TARGET	Rp.	TARGE I	TARGET	Rp.	TARGE I			TARGET	Rp.	TARGE I	TARGET	Rp.	TARGE I	TARGET	Rp.	TARGE I	TARGET
				Pembelajaran Barang Milik Daerah Peningkatkan Usaha Pemerintah Daerah	Terpeliharanya BMD dan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	725.535.000	12 bulan	725.575.000	12 bulan	742.000.000	12 bulan	453.000.000	12 bulan	459.000.000	12 bulan	460.000.000	12 bulan	460.000.000	12 bulan	460.000.000	12 bulan	460.000.000							
				1. Penyediaan Jasa Pendidikan, Baitan Pendidikan, Pijak dan Perizinan Pendidikan Dan Operasional dan Lapangan	Ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	12 bulan	204.580.000	12 bulan	204.580.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	235.000.000	12 bulan	235.000.000	12 bulan	235.000.000	12 bulan	235.000.000	12 bulan	235.000.000							
				2. Penyelenggaraan Perawatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan Mesin lainnya	12 bulan	20.955.000	12 bulan	20.995.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000							
				3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	500.000.000							

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan padasebelumnya pembangunan tahun 2020 juga memulaipelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi focus pada tahunsebelumnya. Pada tahun 2020, Sasaran yang menjadi fokus danstrategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalahSasaran 1 dan 2 yaitu Meningkatkan KesehatanMasyarakat dan Menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaanmasyarakat dalam hidup sehat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Rencana Kerja Tahun 2020 terdapat 14 Program dan Kegiatanpendukung. Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel T-C. 33 berikut ini:

TABEL VI.1

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				UNIT KERJA SKPD PENGANGGARAN WAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET I	Rp.	TARGET I	Rp.			TARGET I	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET I	Rp.	TARGET I	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET I	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
1	Memanggulkan daya saing dan daya tarik masyarakat Kab. Prosser Selatan	Angka Kematian Ibu dan Kehamilan Bakti Kabupaten		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESKUTAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UHH	70,86	71,11		71,36		71,61		72,11		72,36		72,38		72,38							
							2,5	121.127.002.053	2,5	134.881.108.753	2,5	145.246.739.188	2,5	150.397.739.188	2,5	153.815.739.188	2,5	158.386.739.188	2,5	158.386.739.188						
							20 unit	74.609.896.575	23 unit	85.409.896.575	20 unit	89.525.000.000	20 unit	92.580.000.000	20 unit	94.560.000.000	20 unit	97.770.000.000	20 unit	97.775.000.000						
							0%	1 Unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	1 unit	10.000.000.000							
							6 unit	2.000.000.000	6 unit	2.000.000.000	5 unit	2.500.000.000	6 unit	2.500.000.000	4 unit	2.500.000.000	8 unit	3.000.000.000	8 unit	3.000.000.000						
						0%	1 Unit	1 Unit	800.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	900.000.000			
						7 unit	21.000.000.000	7 unit	21.000.000.000		8 unit	22.000.000.000	10 unit	22.000.000.000	12 unit	23.000.000.000	14 unit	23.000.000.000	14 unit	22.000.000.000						
						4 unit	2.000.000.000	4 unit	2.000.000.000		5 unit	2.500.000.000	6 unit	3.000.000.000	7 unit	3.050.000.000	8 unit	3.100.000.000	8 unit	3.100.000.000						

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				TARGE T	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.				
				6 Rehabilitasi dan Peneliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhab	4 unit	1.000.000.000	4 unit	1.000.000.000	6 unit	1.200.000.000	5 unit	1.230.000.000	6 unit	1.250.000.000	6 unit	1.500.000.000					
				7 Pengadaan Pasiran dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pasiran dan Pendukung diberikan (Anulibance, Genset, IPL, Air Bersih, Anulibance Roda 2)	57 unit	25.129.300.000	57 unit	25.129.300.000	60 unit	26.000.000.000	60 unit	27.000.000.000	60 unit	28.000.000.000	60 unit	29.000.000.000					
				8 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan yang diadakan	2 paket	17.000.000.000	2 paket	17.000.000.000	2 paket	17.500.000.000	2 paket	18.000.000.000	2 paket	18.500.000.000	2 paket	19.000.000.000					
				9 Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	2 paket	3.478.065.750	2 paket	3.478.065.750	2 paket	4.000.000.000	2 paket	4.500.000.000	2 paket	5.000.000.000	2 paket	5.500.000.000					
				10 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket Bahan Habis Pakai yang diadakan	1 Paket	2.802.530.825	1 Paket	2.802.530.825	1 Paket	3.000.000.000	1 Paket	3.500.000.000	1 Paket	3.600.000.000	1 Paket	3.800.000.000					
				11 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	225.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	255.000.000	1 paket	260.000.000					
				12 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BSHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ketersediaan distribusi obat dan perlengkapan kesehatan	12 bulan	82.194.850	12 bulan	82.194.850	12 bulan	100.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	130.000.000					
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPK Kesehatan yang mencapai target	100%	46.253.105.178	100%	49.206.653.728	100%	55.586.739.188	100%	57.474.739.188	100%	58.700.739.188	100%	60.251.739.188					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENYANGGUNG JABAT	LOKASI		
							2021				2022		2023		2024		2025				2026	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
				1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase K1 dan K4		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		
				2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin		100%	4.210.588.000	100%	4.210.588.000	100%	5.000.000.000	100%	5.300.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.600.000.000	100%	5.600.000.000		
				3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir		100%	803.042.600	100%	803.042.600	100%	900.000.000	100%	905.000.000	100%	920.000.000	100%	925.000.000	100%	925.000.000		
				4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balin	Persentase pelayanan kesehatan pada balin		100%	128.521.300	100%	128.521.300	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
				5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak dan usia yang diberikan pelayanan kesehatan		60%	128.721.300	60%	128.721.300	100%	200.000.000	100%	205.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000		
				6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif		100%	394.067.100	100%	394.067.100	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000		
				7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan		80%	130.271.300	80%	130.271.300	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000		
				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	260.000.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERAJAAN SKPD PENGANGGARAN WAB	LOKASI		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
				9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer Diabetes Mellitus	persentase pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	260.000.000	100%	265.000.000	100%	270.000.000		270.000.000		
				10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000		165.000.000		
				11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terdiri Tuberculosis	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan terduga tuberculosis	100%	69.085.500	100%	69.085.500	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000		85.000.000		
				12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko HIV	100%	55.469.500	100%	55.469.500	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000		85.000.000		
				13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase desa adat yang mengahut KLB wahala (dianggahagi < 24 jua	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	105.000.000	90%	110.000.000	90%	115.000.000	90%	120.000.000		120.000.000		
				14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terpapar Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan bencana	Persentase desa adat yang mengahut bencana ditanggahagi masalah kesehatan dan penanggahagi Covid-19	100%	5.739.739.188	100%	5.739.739.188	100%	5.739.739.188	100%	5.739.739.188	100%	5.739.739.188	100%	5.739.739.188		5.739.739.188		
				15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Persentase balin gigi bantuk dan bantuk KEB yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	4.011.330.380	100%	4.011.330.380	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000		5.000.000.000		
				16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang membuat pos UKK dan kelompok olahraga	20	217.721.500	21	217.721.500	21	300.000.000	21	305.000.000	21	310.000.000	21	315.000.000		315.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				UNIT KERJA SKPD PENGANGGIAN WAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGE I	Rp.			TARGE I	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGE I	Rp.	TARGE I	Rp.	TARGE I	Rp.	TARGE I	Rp.						
				17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen kajian lingkungan sehat	8 Dokumen	500.000.000	6 Dokumen	523.397.150	7 Dokumen	600.000.000	8 Dokumen	650.000.000	9 Dokumen	700.000.000	10 dokumen	750.000.000							
				18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	media promosi yang diadkan	2 Paket	134.000.000	3 paket	134.000.000	4 paket	150.000.000	5 paket	155.000.000	6 paket	160.000.000	7 paket	165.000.000							
				19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan	20 Puskesmas	47.500.000	21 Puskesmas	47.500.000	21 Puskesmas	50.000.000	21 Puskesmas	50.000.000	21 Puskesmas	50.000.000	21 Puskesmas	50.000.000							
				20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan surveillance epidemiologi, penemuan dan penanggulangan wabah	20 Puskesmas	150.000.000	21 Puskesmas	150.000.000	21 Puskesmas	155.000.000	21 Puskesmas	160.000.000	21 Puskesmas	165.000.000	21 Puskesmas	170.000.000							
				21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODMK yang mendapatkan pelayanan kesehatan	50%	75.000.000	50%	100.000.000	55%	120.000.000	60%	125.000.000	65%	150.000.000	70%	160.000.000							
				22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase insidensi sekolah yang mempunyai kebijakan KTR	50%	300.000.000	55%	311.866.100	60%	315.000.000	65%	320.000.000	70%	325.000.000	75%	330.000.000							
				23 Pengelolaan Gijya Kesehatan Klinis	Jumlah event-event daerah dan Puskesmas	20 event	838.147.730	20 event	838.147.730	20 event	900.000.000	20 event	1.000.000.000	20 event	1.000.000.000	20 event	1.000.000.000							
				24 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase bayi yang mendapat amnisiisasi dasar lengkap (IDL)	80%	600.000.000	82%	608.800.000	85%	700.000.000	87%	702.000.000	88%	705.000.000	90%	710.000.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT) (OUTCOME) (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENGANGGARAN WAB	LOKA SI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGE T	Rp.			TARGE T	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
				25 Pengelolaan Jumlah Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jumlah pendaharuan kesehatan masyarakat	28.760 peserta	12.500.000.000	28.760 peserta	13.500.000.000	28.760 peserta	13.000.000.000	28.760 peserta	13.300.000.000	28.760 peserta	13.200.000.000	28.760 peserta	13.300.000.000							
				26 Desket Dini Penyalahgunaan NAPZA di Enaymker dan Sekolah	Perentase desket dini Nagen di sekolah	30%	80.000.000	50%	125.000.000	70%	127.000.000	75%	128.000.000	80%	130.000.000	85%	132.000.000							
				27 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Perentase pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke rujukan berdasarkan nager Nasional	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	86.000.000	100%	90.000.000							
				28 Pengembangan Kabupaten Kota Sehat	Jumlah Kabupaten dan Kecamatan sehat yang dikan	1 Kab dan 15 Kecamatan	350.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	400.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	420.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	425.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	430.000.000	1 Kab dan 15 Kecamatan	435.000.000	435.000.000						
				29 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan daerah terpencil	20 Puskesmas	1.750.000.000	21 Puskesmas	1.750.000.000	21 Puskesmas	2.000.000.000	21 Puskesmas	2.300.000.000	21 Puskesmas	2.400.000.000	21 Puskesmas	2.500.000.000	2.500.000.000						
				30 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi timan	3 Puskesmas	2.500.000.000	4 Puskesmas	2.540.027.600	5 Puskesmas	3.000.000.000	6 Puskesmas	3.400.000.000	7 Puskesmas	3.500.000.000	8 Puskesmas	3.650.000.000							
				31 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Perentase belendungan dan kecepatan laporan mnggann SKDR dlab alert yang direpon	12 bulan	130.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	160.000.000	160.000.000						
				32 Pengelolaan Jumlah Kesehatan Masyarakat (RSCD Tapun)	Ketersediaan biaya operasional RSU Tapun	12 bulan	750.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bla	800.000.000	12 bla	800.000.000	800.000.000						

NO	TUTUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUGAS SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENGUNJUNG WAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				TARGE T	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
				33. Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Tapan)	Ketersediaan biaya operasional RSUD Tapan	12 bulan	7.000.000.000	12 bulan	10.000.000.000	12 bulan	11.000.000.000	12 bulan	11.500.000.000	12 bulan	12.000.000.000	12 bulan	13.000.000.000	12 bulan	13.000.000.000			
				34. Operasional Pelayanan Puskesmas	Ketersediaan biaya operasional Puskesmas	20 Puskesmas	2.000.000.000	20 Puskesmas	1.694.400.000	21 Puskesmas	3.000.000.000	21 Puskesmas	3.050.000.000	21 Puskesmas	3.100.000.000	21 Puskesmas	3.120.000.000	21 Puskesmas	3.120.000.000			
				Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah profil kesehatan yang dihasilkan	1 Dokumen	114.000.000	1 Dokumen	114.558.450	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	178.000.000	1 Dokumen	182.000.000	1 Dokumen	188.000.000	1 Dokumen	188.000.000			
			1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah profil kesehatan yang dihasilkan	1 Dokumen	114.000.000	1 Dokumen	114.558.450	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	116.000.000	1 Dokumen	117.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000			
			2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Ketersediaan Sistem e-Health obot	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.245.000	12 bln	60.000.000	12 bln	62.000.000	12 bln	65.000.000	12 bln	68.000.000	12 bln	68.000.000			
				Perbaikan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki persentase rujukan sesuai dengan standar KBK	8 Puskesmas	150.000.000	8 Puskesmas	150.000.000	10 Puskesmas	160.000.000	12 Puskesmas	165.000.000	14 Puskesmas	173.000.000	16 Puskesmas	177.000.000	16 Puskesmas	177.000.000			
			1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Mutu Pelayanan Puskesmas	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	108.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	110.000.000			
			2	Peningkatan kemampuan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Puskesmas yang memiliki persentase rujukan sesuai dengan standar KBK	10%	50.000.000	10%	50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		67.000.000		67.000.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN ANGGARAN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGE T	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
		2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	30 orang	300.000.000	30 orang	400.000.000	30 orang	402.000.000	30 orang	405.000.000	30 orang	410.000.000	30 orang	415.000.000	30 orang	415.000.000			
				Pembinaan Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	30 orang	100.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000			
				1. Pengembangan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah rekomendasi izin operasional Puskesmas, Rumah sakit dan Klinik Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan	50 bh	50.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000	50 bh	100.000.000			
				2. Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan serta Tidak Lajut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan yang dibina	800 Pegawai	50.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000	800 Pegawai	100.000.000			
				Perencanaan Kelahiran dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000			
				1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80 org	100.000.000	80 org	100.000.000	80 org	102.000.000	80 org	105.000.000	80 org	110.000.000	80 org	115.000.000	80 org	115.000.000			
				1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80 org	100.000.000	80 org	100.000.000	80 org	102.000.000	80 org	105.000.000	80 org	110.000.000	80 org	115.000.000	80 org	115.000.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REGISTRASI		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				TARGE T	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80 org	209.000.000	80 org	765.549.196	80 org	240.000.000	80 org	255.000.000	80 org	265.000.000	80 org	275.000.000	80 org	275.000.000			
				Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80 org	209.000.000	80 org	209.475.000	80 org	240.000.000	80 org	255.000.000	80 org	265.000.000	80 org	275.000.000	80 org	275.000.000			
			1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan petizium apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optik, usaha mikro obat tradisional (umot)	Ketersediaan Penerimaan dan Pengawasan	12 bulan	9.600.000	12 bulan	9.475.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000			
			2	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan petizium apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optik, usaha mikro obat tradisional (umot)	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	80%	200.000.000	80%	200.000.000	80%	230.000.000	80%	240.000.000	80%	245.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000			
				penyerahan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan / restoran dan depot air minum (dam)	Penyerahan sertifikat laik sehat depot air minum	20 depot	350.000.000	20 depot	389.723.600	30 depot	340.000.000	35 depot	350.000.000	40 depot	360.000.000	45 depot	370.000.000	45 depot	370.000.000			
			1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penyerahan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan	Penyerahan sertifikat laik sehat depot air minum	20 depot	350.000.000	20 depot	389.723.600	30 depot	340.000.000	35 depot	350.000.000	40 depot	360.000.000	45 depot	370.000.000	45 depot	370.000.000			
3. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Nagari ber-PHBS	80%	500.000.000	80%	556.074.196		562.000.000		615.000.000		700.000.000		760.000.000		760.000.000			
				Advokasi, pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan luas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota	persentase ketersediaan media promosi	80%	300.000.000	80%	311.355.340		312.000.000		315.000.000		350.000.000		360.000.000		360.000.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENGANGGARAN WAB	LOKASI		
							2021				2022		2023		2024		2025		2026				TARGE T	Rp.
							TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGE T	Rp.								
				1. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	persentase ketercapaian media promosi	60%	300.000.000	60%	311.355.340		312.000.000	315.000.000	350.000.000	360.000.000	%	360.000.000		360.000.000						
				Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Nagari ber-PHBS	60%	200.000.000	60%	244.718.856	65%	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000						
				1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Nagari ber-PHBS	60%	200.000.000	60%	244.718.856	65%	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000						
		4. Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Dinas Kesehatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	95.224.405.000	12 bulan	96.253.045.000	12 bulan	100.422.000.000	102.139.500.000	103.158.000.000	99.807.000.000	12 bulan	99.807.000.000	12 bulan	99.807.000.000						
				PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan	34 dokumen	220.000.000	34 dokumen	225.600.000	34 dokumen	230.000.000	230.000.000	230.000.000	234.000.000	34 dokumen	234.000.000	34 dokumen	234.000.000						
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	129.600.000	10 dokumen	130.000.000	130.000.000	140.000.000	132.000.000	10 dokumen	132.000.000	10 dokumen	132.000.000						
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dihasilkan	24 dokumen	100.000.000	24 dokumen	100.000.000	24 dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.000.000	24 dokumen	102.000.000	24 dokumen	102.000.000						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan gaji dan operasional keuangan	12 bulan	68.500.000.000	12 bulan	69.500.000.000	12 bulan	73.500.000.000	75.500.000.000	76.500.000.000	73.135.000.000	12 bulan	73.135.000.000	12 bulan	73.135.000.000						

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENGANGGARAN WAB	LOKASI						
							2021						2022		2023		2024				2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji PNS Dinas Keselamatan	14 bulan 14 bulan	14 bulan	65.000.000.000	14 bulan	66.000.000.000	14 bulan	70.000.000.000	14 bulan	72.000.000.000	14 bulan	73.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000	14 bulan	74.000.000.000						
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honor-honor ASN Dinas Keselamatan dan 20 Puskesmas	12 bulan	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000						
				Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	3 orang	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000						
				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	3 orang	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000						
				Peningkatan pelayanan BLUD	Ketersediaan operasional Puskesmas	12 bln	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000						
				1. Pelayanan dan pemenuhan pelayanan BLUD	Ketersediaan operasional Puskesmas	12 bln	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000	12 bln	25.000.000.000						
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan operasional kantor	12 bulan	12 bulan	378.870.000	12 bulan	378.870.000	12 bulan	480.000.000	12 bulan	484.500.000	12 bulan	487.000.000	12 bulan	494.000.000	12 bulan	494.000.000						
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik peningkatan bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000						

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA SKPD PENGANGGARAN WAB	LOKASI						
							2021			2022			2023			2024						2025			2026		
							TARGET	Rp.	TARGET	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET				Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Pembelajaran Barang Milik Daerah Peningkat Uraian Pemerintah Daerah	Terpeliharanya BMD dan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	725.535.000	12 bulan	725.575.000	12 bulan	742.000.000	12 bulan	453.000.000	12 bulan	459.000.000	12 bulan	460.000.000	12 bulan	460.000.000								
				1. Penyediaan Jasa Pendidikan, Bayan Pendidikan, Pijak dan Perizinan Pendidikan Dan Operasional dan Lapangan	Ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	12 bulan	204.580.000	12 bulan	204.580.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	235.000.000	12 bulan	235.000.000	12 bulan	235.000.000								
				2. Penyelenggaraan Perawatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan Mesin lainnya	12 bulan	20.955.000	12 bulan	20.995.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000								
				3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	500.000.000	50%	200.000.000	50%	200.000.000	50%	200.000.000	50%	200.000.000								

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada Tabel T-C.33. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2016-2021 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan Arah kebijakan tahun 2021 dalam RPJMD adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Kesehatan memiliki 14 Program dan Kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.



BAB V PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Solok dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja tahun 2022 ini dititik beratkan pada upaya peningkatan meningkatkan kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan kualitas pelayanan dengan membangun sarana prasarana yang sesuai standar, meningkatkan kompetensi SDM dan melaksanakan pelayanan sesuai standar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.